

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Pada Pasal 95 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi. Tugas dan wewenang DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 101 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dibahas lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaannya dalam Tata Tertib DPRD.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa dan Kota Semarang menjadi ibu kota provinsi. Luas wilayah Jawa Tengah adalah 32.800,69 km<sup>2</sup> atau 28,94% dari luas Pulau Jawa. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik tahun 2021, jumlah penduduk Jawa Tengah adalah 36.516.035 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Secara administratif, Jawa Tengah memiliki 6 kota, 29 kabupaten, dan 576 kecamatan (jateng.bps.go.id, 2021).

Letak Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah berada di wilayah yang sama dengan Gedung Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu berlokasi di Jalan Pahlawan, Kota Semarang.

*Gambar 2.1* Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber: [dprd.jatengprov.go.id](http://dprd.jatengprov.go.id) (2023)

### 2.1.1 Visi dan Misi DPRD Provinsi Jawa Tengah

Visi dan Misi DPRD Provinsi Jawa Tengah berfungsi dalam menyatakan tujuan dan arah instansi serta upaya untuk mencapainya. Adapun visi dan misi dari DPRD Provinsi Jawa Tengah ialah sebagai berikut:

#### 1. Visi

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses legislatif, penganggaran, dan pengawasan;
- b. Menumbuh-kembangkan sinergi antar alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Pembinaan kerjasama antara DPRD, pemerintah daerah, dan Forum Muspida;
- d. Mendorong lebih banyak masukan publik dalam semua pengambilan keputusan DPRD;

- e. Meningkatkan efisiensi organisasi DPRD melalui hubungan dua arah yang lebih baik dengan semua sektor masyarakat.

## **2. Misi**

Mendukung meningkatnya kualitas sumber daya manusia menuju Provinsi Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari di tahun 2016 secara berkelanjutan melalui efektifitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah serta penanganan aspirasi masyarakat. (dprd.jatengprov.go.id, 2020).

### **2.1.2 Alat Kelengkapan DPRD Jawa Tengah**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka dewan dibantu oleh alat kelengkapan dewan yang meliputi:

1. Komisi

Mengacu pada Pasal 113 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, komisi dapat dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut: DPRD Provinsi dengan anggota berjumlah 35 sampai 55 orang dapat membentuk 4 komisi; dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi.

DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki anggota sejumlah 120 orang, oleh sebab itu terdapat 5 komisi yang terbentuk, antara lain:

a. Komisi A (Bidang Pemerintahan)

Pemerintahan, keamanan, ketertiban, pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kepegawaian daerah, sosial politik, organisasi kemasyarakatan, arsip dan perpustakaan, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendidikan dan pelatihan kepegawaian adalah bagian dari Bidang Pemerintahan.

b. Komisi B (Bidang Perekonomian)

Bidang Perekonomian meliputi perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, ketahanan pangan dan logistik, dunia usaha dan badan penanaman modal, dan koperasi UKM dan dunia usaha.

c. Komisi C (Bidang Keuangan)

Bidang Keuangan meliputi keuangan daerah, pendapatan daerah, perpajakan, retribusi, badan usaha milik

negara, perusahaan patungan dan penanaman modal dan badan layanan umum daerah.

d. Komisi D (Bidang Pembangunan)

Bidang Pembangunan meliputi bina marga, cipta karya, permukiman dan tata ruang, perumahan rakyat, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

e. Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

Ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama, budaya, sosial, kesehatan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk adalah bagian dari Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2. Badan Kehormatan

Melalui Keputusan DPRD anggota Badan Kehormatan (BK) berjumlah 7 orang berasal dari masing-masing fraksi, dipilih dari dan oleh Anggota DPRD secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai dilakukan pemilihan melalui perolehan suara terbanyak. Pimpinan BK terdiri dari 1 orang Ketua dan 1 orang Wakil Ketua.

3. Badan Musyawarah

DPRD membentuk Badan Musyawarah atau disingkat Bamus pada setiap awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Saat ini Bamus terdiri dari 38 orang yang berasal dari unsur-unsur Fraksi. Bamus memiliki tugas untuk menetapkan agenda DPRD untuk 1 tahun sidang, 1 masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, menetapkan jadwal penyelesaian Rencana Peraturan Daerah (Raperda). Bamus juga memiliki kewenangan untuk memberi pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk menetapkan garis kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Bamus juga bertugas untuk menentukan jadwal rapat DPRD dan tugas lain yang diserahkan dalam Rapat Paripurna.

#### 4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperda) adalah 19 orang yang terbagi dari 8 Fraksi. Tugas dari Bamperda antara lain: menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Bamperda juga melakukan koordinasi dengan pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Bamperda juga dapat memberi masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah dan tugas-tugas lainnya.

#### 5. Badan Anggaran

Anggota Badan Anggaran (Banggar) diusulkan oleh masing-masing Fraksi dan berjumlah 42 orang anggota. Banggar memiliki tugas untuk memberi saran berupa pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan RAPBD; mengonsultasikan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kepada Komisi; melakukan penyempurnaan terhadap anggaran-anggaran daerah; dan sebagainya.

### **2.1.3 Fraksi**

Sesuai Pasal 325 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa “fraksi menjadi wadah perhimpunan anggota DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya”. Terdapat beberapa fraksi dalam keberjalanan DPRD Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. Fraksi Demokrat-Nasdem
2. Fraksi Gerindra
3. Fraksi PDIP
4. Fraksi Golkar
5. Fraksi PAN
6. Fraksi PKB
7. Fraksi PKS
8. Fraksi PPP

### 2.1.3.1 Fraksi PDI-Perjuangan

Dalam skripsi ini, peneliti melaksanakan penelitian di Fraksi PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan memiliki kursi terbanyak yaitu 42 kursi dari total 120 kursi, penambahan kursi ini terjadi pada periode 2019 – 2024. Pada periode 2014 – 2019 jumlah kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 100 kursi secara keseluruhan dan PDI-Perjuangan memiliki 27 kursi.

PDI-Perjuangan memiliki kursi pada 13 Daerah Pemilihan di Jawa Tengah (Tabel 2.1). Wilayah Daerah Pemilihan di Jawa Tengah ([jateng.kpu.go.id](http://jateng.kpu.go.id)) yaitu:

- 1) Daerah Pemilihan 1 : Kota Semarang
- 2) Daerah Pemilihan 2 : Semarang, Kendal, Kota Salatiga
- 3) Daerah Pemilihan 3 : Kudus, Jepara, Demak
- 4) Daerah Pemilihan 4 : Rembang, Pati
- 5) Daerah Pemilihan 5 : Grobogan, Blora
- 6) Daerah Pemilihan 6 : Wonogiri, Karanganyar, Sragen
- 7) Daerah Pemilihan 7 : Klaten, Sukoharjo, Kota Surakarta
- 8) Daerah Pemilihan 8 : Magelang, Boyolali, Kota Magelang
- 9) Daerah Pemilihan 9 : Purworejo, Wonosobo, Temanggung
- 10) Daerah Pemilihan 10 : Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen
- 11) Daerah Pemilihan 11 : Cilacap, Banyumas
- 12) Daerah Pemilihan 12 : Tegal, Brebes, Kota Tegal



13) Daerah Pemilihan 13 : Batang, Pekalongan, Pemalang, Kota Pekalongan.

Dari 13 Daerah Pemilihan di Jawa Tengah, peneliti melaksanakan wawancara kepada 3 Anggota Dewan (**1.7.3 Subjek Penelitian**, Bab I) di 3 Daerah Pemilihan yang berbeda. Berikut profil wilayah Daerah Pemilihan tersebut:

1. Daerah Pemilihan 1: Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jawa Tengah. Saat ini Walikota Semarang ialah Hevearita Gunaryanti Rahayu dengan masa jabatan tahun 2021 – 2026. Dengan luas 373,80 km<sup>2</sup>, Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Semarang mengalami kenaikan semenjak 2020 yang berjumlah 1.653.524 menjadi 1.659.975 pada tahun 2022 (semarangkota.bps.go.id, 2023).

Mengacu pada data tahun 2022 BPS Kota Semarang, dari total 994.091 penduduk bekerja, urutan status pekerjaan utama adalah buruh/karyawan/pegawai (61,77%), berusaha sendiri (20,18%), berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar (5,30%), dan yang terakhir yaitu status berusaha dibantu oleh buruh bayar tetap dan dibayar (2,45%). Lapangan pekerjaan utama di Kota Semarang yaitu sektor jasa sebesar 70,27% dan yang paling kecil adalah pertanian sebesar 1,46% (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023).

## 2. Daerah Pemilihan 5: Grobogan dan Blora

### a. Grobogan

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan berada di Purwodadi. Luas wilayah Grobogan ialah 2.013,90 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 19 kecamatan, 7 kelurahan, dan 273 desa. Penduduk Grobogan berjumlah 2.488.947,00 pada tahun 2021 (grobogankab.bps.go.id, 2022).

Pada tahun 2021, 72,88% penduduk bekerja dari total 1.074.357 penduduk usia kerja. Status pekerjaan di Grobogan didominasi oleh status berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yaitu sebesar 26,65%; diikuti dengan pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 18,77%; dan status pekerjaan dengan presentase terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu 2,81%. Lapangan pekerjaan penduduk di wilayah Grobogan yang terbesar bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 289,88 ribu orang (38,72%). Sebesar 75,11% lainnya bekerja pada sektor informal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2022).

### b. Blora

Kabupaten Blora memiliki luas sebesar 1.804,60 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai 888.224 jiwa pada tahun 2022 (blorakab.bps.go.id, 2022). Kabupaten Blora memiliki

16 kecamatan, 24 kelurahan, dan 271 desa dengan pusat pemerintahan yang berada di Kecamatan Blora Kota.

Menurut data BPS tahun 2021, total penduduk yang bekerja adalah 467.018 jiwa, dengan status pekerjaan penduduk terbanyak berada pada status buruh/karyawan/pegawai berjumlah 114.434 penduduk; berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar yaitu 109.215 penduduk; pekerja keluarga/tidak dibayar berjumlah 98.129 penduduk; dan yang paling sedikit adalah berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebanyak 15.751 penduduk. Lapangan pekerjaan didominasi pada sektor pertanian yaitu 213.114 penduduk (45,63%), diikuti oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi kendaraan 14,78%, dan yang paling kecil adalah pengadaan air, kelola sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 0,13% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, 2022).

### 3. Daerah Pemilihan 6: Wonogiri, Karanganyar, Sragen

#### a. Wonogiri

Kabupaten Wonogiri memiliki luas 1.822,37 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai 1.057.087 jiwa pada tahun 2022 (wonogirikab.bps.go.id, 2023). Kabupaten Wonogiri meliputi 25 kecamatan, 43 kelurahan dan 251

desa, pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Wonogiri.

Status pekerjaan dengan presentase terbesar mengacu pada data BPS Kabupaten Wonogiri pada Agustus 2020 adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebesar 31,65%; buruh/pegawai/karyawan sebesar 23,05%; berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebesar 2,11%; dan sebagainya. Dari sekitar 557.865 penduduk yang bekerja, lapangan pekerjaan masyarakat didominasi oleh sektor pertanian sebesar 43,49%, perdagangan 23,37% dan yang paling kecil ialah sektor jasa yaitu 9,46% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, 2021).

#### **b. Karanganyar**

Kabupaten Karanganyar memiliki luas sebesar 773 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 17 Kecamatan, 15 Kelurahan, dan 162 Desa. Pusat pemerintahan dan perekonomian berada di Kecamatan Karanganyar Kota. Pada tahun 2022, jumlah penduduknya berjumlah 947.642 jiwa (karanganyarkab.bps.go.id, 2023).

Dari total 466.565 jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Karanganyar, status pekerjaan didominasi oleh status buruh/karyawan/pegawai dengan total 202.847 orang; berusaha sendiri yaitu sebesar 87.355 orang; yang

paling kecil ialah status berusaha dibantu butuh tetap/dibayar yaitu 13.779 orang. Lapangan pekerjaan didominasi oleh sektor industri dan pengolahan sebesar 118.486 orang; diikuti dengan pertanian sebesar 95.346 orang; dan sebagainya (karanganyarkab.bps.go.id, 2020).

**c. Sragen**

Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah sebesar 941,6 km<sup>2</sup> yang meliputi 20 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 196 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Sragen adalah 992.243 jiwa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sragen.

Berdasarkan data tahun 2021, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Sragen adalah 483.592 jiwa. Status pekerjaan didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebesar 151.708 penduduk; diikuti oleh status berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yaitu 88.385 penduduk; dan yang terkecil ialah status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu 15.719 penduduk.

*Tabel 2 1 Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Tahun 2019 DPRD Provinsi Jawa Tengah*

No	Nama	Dapil Jawa Tengah													Jumlah Akhir	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	2	2	2	3	5	5	4	2	3	4	3	4	42	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13
3	Partai Demokrat	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	5	
4	Partai Golongan Karya	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
5	Partai Amanat Nasional	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	6	
6	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	20	
7	Partai Keadilan Sejahtera	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	10	
8	Partai Persatuan Pembangunan	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	9	
9	Partai Nasdem	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	
<b>Jumlah Kursi Partai Politik</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>120</b>	

Sumber: jateng.kpu.go.id (2023)

Gambar 2. 2 Anggota Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Jawa Tengah

Fraksi PDIP

Ketua				Wakil Ketua				Sekretaris			
H. BAMBANG HARIYANTO B				MH ZAINUDIN S.Sos, M.Hum				EKO SUSILO			
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
RR. MARIA TRI MANGESTI, SE	A. BAGINDA MUHAMMAD MAHFUZ H.	ALBERTUS AGUNG SATRIA H.	ANDANG WAHYU TRIYANTO, SE, MM	YOHANES WINARTO, SH,MM	Hj ENDRIANING SIH YUNITA H, Sd	H SAREI ABDUL ROSYID, SIP	H SOETJIPTO, SH,MM				
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
ASFIRLA HARISANTO SE	AYUNING SEKAR SUCI, B.BUS.MIB.M A	DANIE BUDI TJAHYONO	DENNY NUR CAHYANTO, SE	H. AHMAD RIDWAN, SE, MM	H. BAMBANG KUSRIYANTO, B. Sc	H. ENDRO DWI CAHYONO, ST	H. PUJO WIDIONO, SH				
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
DR H ALWIN BASRI, MM	dr. MESSY WIDIASTUTI, MARS	Drs. STEPIANUS SUKIRNO, MS	DYAH KARTIKA PERMANASA RI, SE, MM	H. SAMIRUN, S.H., M.H	UNTUNG WIBOWO SUKOWATI	H. SUMANTO, SH	H.MOCH ICHWAN,SH, MH				
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
HARTANTO	Hj IRNA SETYOWATI, SE	Hj. KADARWATI, S.H., M.H	Hj PENI DYAH PERWITOSAR I S.Sos	Ir SULISTYORINI, MM	PARAMITHA ATIKA PUTRI, SE, MM,	Ir. H. JOKO PURNOMO, MH	ISNAENI				
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
JULI KRISDIANTO	M.G. MARHAENIS MANTO	SUMARSONO, S.Sos	SAEFUL HADI, S.IKom	SARNO, SE	SRI RUWIYATI, SE,MM	SUMARJI					

Sumber: [dprd.jatengprov.go.id](http://dprd.jatengprov.go.id) (2023)

